



Ringkasan Eksekutif KONDISI KEMISKINAN PROVINSI JAMBI 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**



Ringkasan Eksekutif

KONDISI KEMISKINAN PROVINSI JAMBI

2015



<http://jambi.bps.go.id>

Kata Pengantar

Data dan informasi kemiskinan sudah menjadi kebutuhan berbagai kalangan pengguna data statistik. Oleh karena itu, publikasi Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2015 bisa menjadi referensi konsumen data dalam perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, penelitian, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan data kemiskinan. Publikasi ini berisi ringkasan kemiskinan dan kaitannya dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para konsumen data.

Jambi, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jambi



Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Umum	1
Metode Pengukuran dan Indikator Kemiskinan	2
Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi	4
Kondisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jambi	16
Lampiran	25

<http://jambi.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

1. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, tahun 2011-2015	9
2. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) di Provinsi Jambi menurut daerah, tahun 2011-2015	13
3. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Provinsi Jambi menurut daerah, tahun 2011-2015	16

<http://jambi.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

1. Tren Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015	4
2. Diagram Kontrol Perubahan Jumlah Penduduk Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015	5
3. Diagram Kontrol Perubahan Persentase Penduduk Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015	6
4. Kategori Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015.....	8
5. Garis Kemiskinan Provinsi Jambi Menurut Komponennya, Maret 2013-September 2015	10
6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Jambi, Tahun 2011-2015.....	11
7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Tahun 2011-2015.....	12
8. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2011-2015.....	13
9. Indeks Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Tahun 2011-2015	14
10. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2011-2015.....	15
11. Koefisien Gini Provinsi Jambi, 2013-2015.....	17
12. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, 2014-2015.	18
13. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2015.....	19

14. Diagram Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, Tahun 2015.	20
15. Pola Hubungan Garis Kemiskinan Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2015.	21
16. Koefisien Gini Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, 2015.	22
17. Perubahan Koefisien Gini Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, Tahun 2014- 2015.	23
18. Diagram Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2015.	24

<http://jambi.bps.go.id>

UMUM

Data kemiskinan yang akurat menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung strategi pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Berkaitan dengan target pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, maka informasi mengenai profil dan karakteristik kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan (*stakeholder*). Profil dan karakteristik kemiskinan tersebut ditulis dalam bentuk ringkasan eksekutif agar dapat memberikan gambaran mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi. Sehingga para perencana program dan pengambil kebijakan dapat lebih fokus dalam menentukan program-program yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin.

Tujuan

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data kemiskinan 2015 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami indikator-indikator utama kemiskinan yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Jambi menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret maupun September 2015. Karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin juga disajikan pada tingkat provinsi dan dipisahkan antara daerah perkotaan dan

perdesaan. Ringkasan ini juga menyajikan distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya secara provinsi menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sumber data yang digunakan adalah data Susenas Modul Konsumsi dan Kor 2015.

METODE PENGUKURAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

Teori Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Metode Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index* (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk atau rumah tangga miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

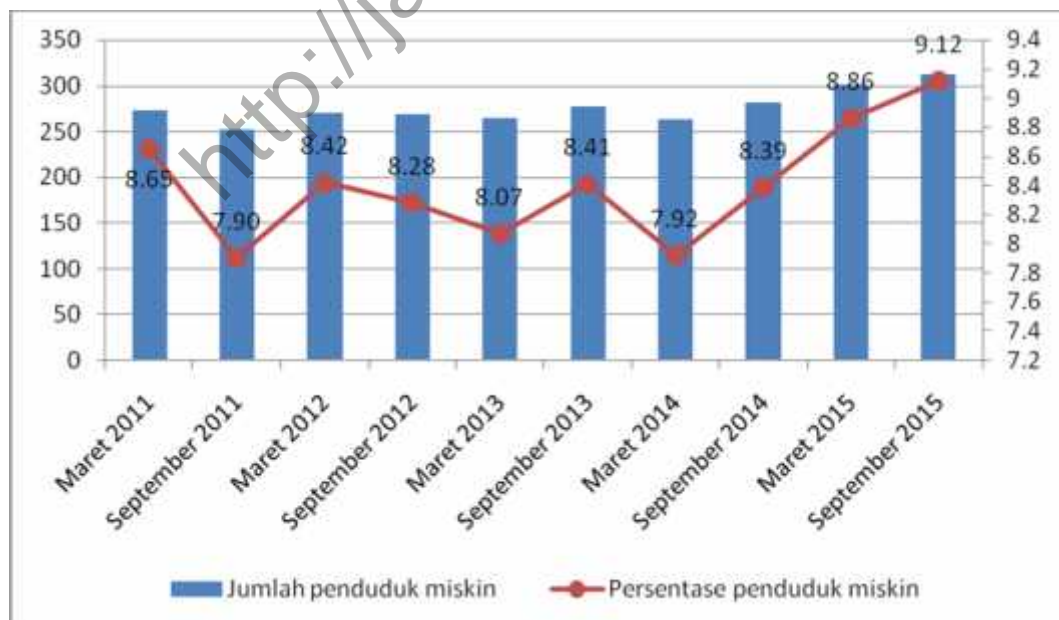
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2011-2015 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Gambar 1). Jika dilihat secara absolut, pada periode Maret 2011 menuju September 2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 35,79 ribu jiwa, yaitu dari 272,77 ribu jiwa pada Maret 2011 menjadi 311,56 ribu jiwa pada September 2015. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan secara relatif mengalami kenaikan dari 8,65 persen pada maret 2011 menjadi 9,12 persen pada september 2015.

Gambar 1. Tren Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015



Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Dalam periode lima tahun terakhir yaitu mulai maret 2011 sampai dengan september 2015, rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 276,26 ribu jiwa. Perubahan naik-turun jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari nilai standar simpangan baku dalam periode yang sama yaitu berkisar 17,98 ribu. Dengan nilai simpangan baku sebesar itu menandakan bahwa jumlah penduduk miskin selama periode maret 2011 s/d september 2015 begitu berfluktuatif, dengan kata lain belum ada arah atau kecenderungan yang jelas apakah jumlah penduduk miskin ini cenderung menurun atau bahkan cenderung meningkat. Meskipun demikian dalam periode dua tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan mencapai yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Apabila data tersebut dibuat dalam diagram kontrol dengan menggunakan rata-rata ditambah simpangan baku sebagai batas atas, serta rata-rata dikurangi simpangan baku sebagai batas bawah. Maka akan diperoleh gambar sebagai berikut :

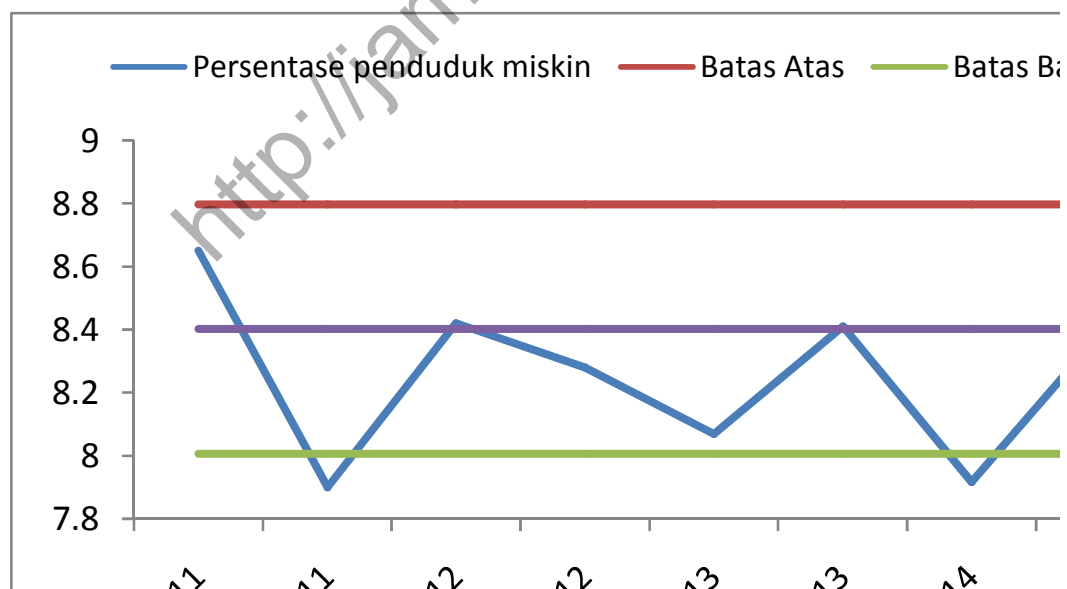
Gambar 2. Diagram Kontrol Perubahan Jumlah Penduduk Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015



Berdasarkan diagram di atas memberikan gambaran bahwa ada beberapa titik waktu berada dibawah dan di atas kontrol. Pada September 2011 angka kemiskinan berada di bawah kontrol, hal ini menandakan makna positif karena jumlah penduduk miskin berada pada titik terendah dalam periode lima tahun terakhir. Sebaliknya di tahun 2015 menjadi periode waktu yang memprihatinkan bagi pencapaian kemiskinan karena jumlah penduduk miskin berada di atas batas kontrol, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin sangat signifikan dan harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk bisa menanggulangnya.

Jumlah penduduk akan terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk pada dasarnya mengikuti pola distribusi eksponensial sehingga menjadi penting untuk terus memperhatikan perkembangan persentase penduduk miskin tiap waktunya. Berikut disajikan diagram kontrol dari persentasi penduduk miskin.

Gambar 3. Diagram Kontrol Perubahan Persentase Penduduk Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015

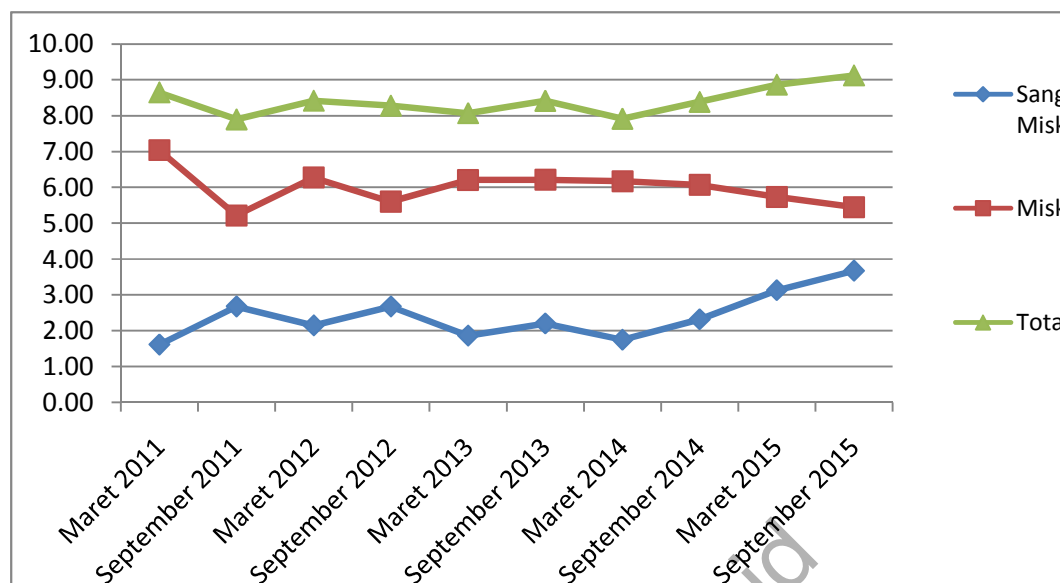


Persentase penduduk miskin berada di bawah batas bawah terjadi pada periode September 2011 dan Maret 2014, dua periode waktu tersebut menjadi masa terbaik bagi Provinsi Jambi karena menjadi kondisi dimana persentase

penduduk miskin terendah dalam periode lima tahun terakhir. Kondisi sebaliknya terjadi pada periode tahun 2015, persentasi penduduk miskin berada jauh di atas batas atas kontrol, hal ini berarti perubahan persentase penduduk miskin tersebut benar-benar signifikan terjadi, bukan hanya keluar-masuknya penduduk menjadi miskin-tidak miskin, namun bisa disebabkan karena adanya penduduk miskin baru.

Ada pola menarik dalam periode tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, persentasi penduduk miskin menunjukkan kenaikan setiap periode september dibandingkan periode maret pada tahun yang sama. Dengan kata lain kondisi ekonomi pada september terasa begitu berat bagi penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (GK), sehingga mereka sewaktu-waktu kembali masuk kedalam kemiskinan. Sebagaimana diketahui, periode september berdekatan dengan momen tahun ajaran baru pada kalender akademik dan bulan ramadhan bagi umat islam. Pada dua kondisi tersebut terjadi peningkatan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, namun di sisi lain tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pendapatan sehingga rumah tangga harus mengatur pola konsumsi rumah tangganya. Pemenuhan kebutuhan sandang yang meningkat pada periode waktu tersebut memaksa rumah tangga untuk mengurangi konsumsi makanan. Selain itu faktor harga juga menjadi determinan kondisi kemiskinan rumah tangga. Seperti diketahui pergerakan pendapatan tidak sebanding dengan pergerakan harga komoditi pada periode waktu pergantian tahun ajaran sekolah dan bulan ramadhan.

Kondisi kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kondisi yaitu Sangat Miskin dan Miskin. Pengkategorian kondisi kemiskinan menurut periode waktu dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. Kategori Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2011-September 2015

Pola pergerakan penduduk dalam kategori 'sangat miskin' menunjukkan kenaikan pada periode september dibandingkan periode maret pada tahun yang sama. Ulasan pada bagian sebelumnya sudah cukup jelas menggambarkan kondisi rumah tangga sangat miskin di Provinsi Jambi, bahwa setiap periode september beban ekonomi yang begitu berat dirasakan oleh penduduk miskin utamanya mereka yang masuk dalam kategori 'sangat miskin'. Penjelasan ini senada dengan temuan pada data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinannya yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Jambi

Secara pengukuran jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, oleh karenanya besaran angka garis kemiskinan sangat menentukan besaran jumlah penduduk miskin. Selama periode Maret 2011-September 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 47,94 persen, yaitu dari Rp.242.272,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp.358.426,- per kapita per bulan pada September 2015.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, tahun 2011 – 2015

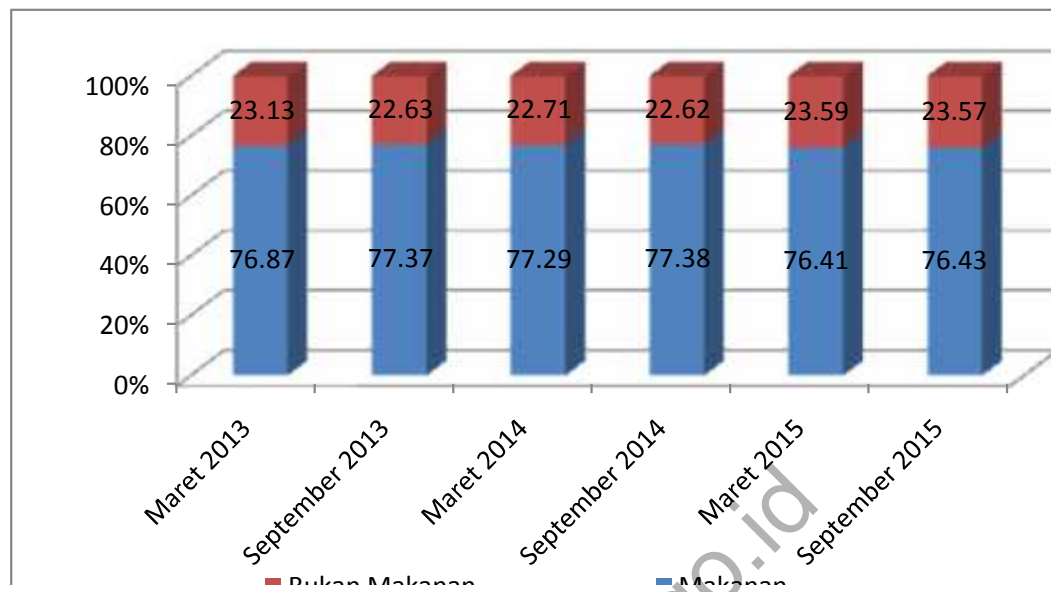
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
1	2	3	4
Maret 2011	294.522	219.144	242.272
September 2011	316.123	233.566	258.888
Maret 2012	311.311	236.165	259.257
September 2012	328.504	248.812	273.267
Maret 2013	337.930	258.408	282.803
September 2013	369.835	280.660	307.885
Maret 2014	379.183	291.534	318.262
September 2014	390.931	302.162	329.181
Maret 2015	406.074	316.838	343.935
September 2015	423.855	329.895	358.426

Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Jika memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) menurut klasifikasi daerah, yang terdiri dari Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan Garis Kemiskinan daerah perdesaan, terlihat bahwa garis kemiskinan di daerah perkotaan naik sebesar 43,91 persen yaitu dari Rp 294.522,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp 423.855,- per kapita per bulan pada September 2015. Kenaikan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan yaitu naik sebesar 50,54 persen, dari Rp. 219.144,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp 329.895,- per kapita per bulan pada September 2015.

Komponen Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Peranan Garis Kemiskinan Makanan dalam menentukan besaran Garis Kemiskinan lebih besar dibanding peranan Garis Kemiskinan Non Makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2015 kontribusi Garis Kemiskinan Makanan sebesar 76,43 persen atau meningkat 0,02 persen dari Maret 2015. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terlihat bahwa kontribusi GK makanan pada periode september selalu lebih tinggi dari periode maret.

Gambar 5. Garis Kemiskinan Provinsi Jambi menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2013-September 2015



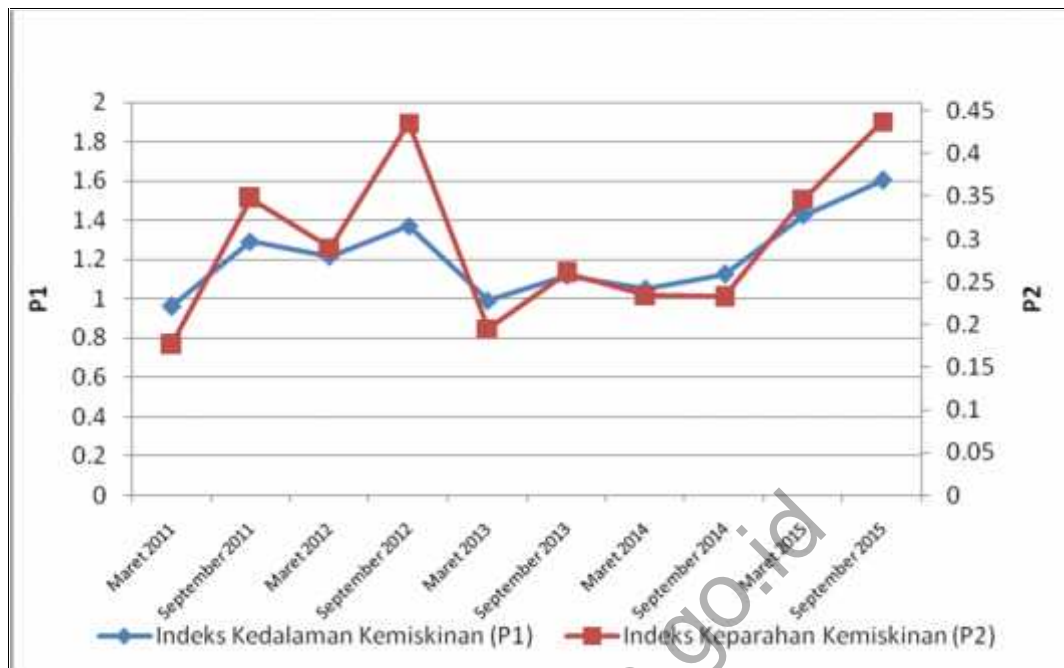
Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jambi

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

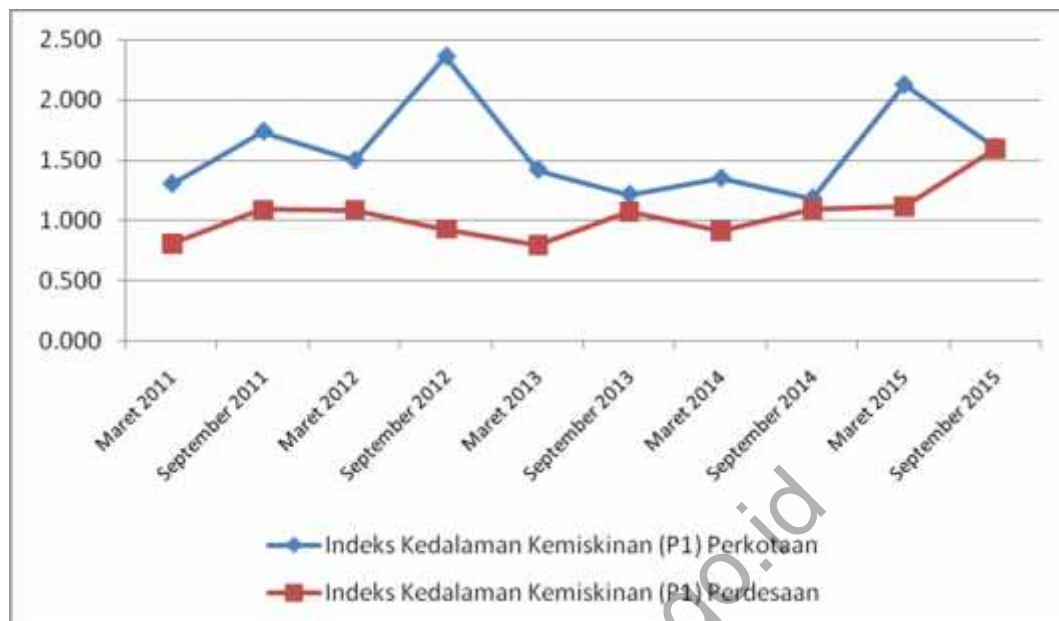
Gambar 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Jambi, Tahun 2011-2015



Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

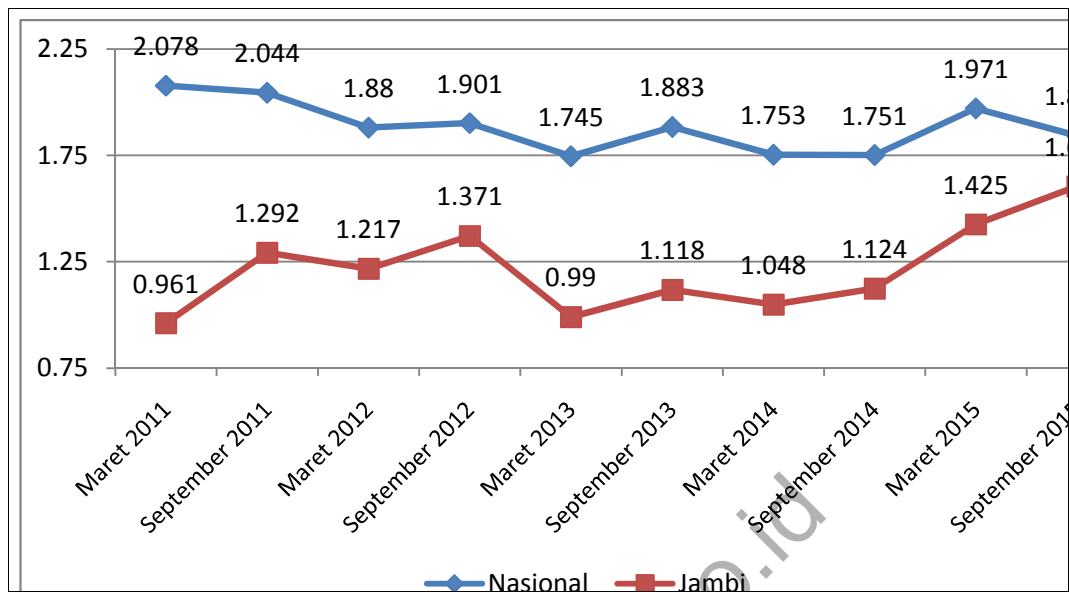
Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas periode Maret 2011-September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan fluktuasi yang begitu tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,961 pada keadaan Maret 2011 menjadi 1,604 pada keadaan September 2015. Peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,176 pada Maret 2011 menjadi 0,437 pada September 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pada pengeluaran penduduk miskin semakin lebar. Grafik di atas juga memberikan gambaran bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan keparahan kemiskinan (P_2) mempunyai pola yang sama, dengan demikian hubungan antara keduanya begitu tinggi. Ketika P_1 naik maka kemungkinan besar P_2 juga akan meningkat, begitu sebaliknya ketika P_2 naik maka P_1 juga akan naik. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah untuk mengurangi kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan itu bisa dilakukan secara serempak atau sejalan.

Gambar 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Tahun 2011-2015



Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perdesaan sebesar 1,599 sementara di daerah perkotaan mencapai 1,614. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga miskin yang tinggal di perkotaan tingkat pengeluarannya berada jauh di bawah garis kemiskinan, berbeda dengan mereka yang tinggal di perdesaan lebih mendekati garis kemiskinan. Kalau dilihat dari polanya, ternyata indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, berbeda dengan P_1 di perkotaan yang lebih berfluktuasi dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan, hal ini bisa dilihat dari nilai simpangan baku sebesar 0,39 yang jauh lebih besar dari simpangan baku indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan yang hanya sebesar 0,23. Hal ini mengindikasikan harus adanya kebijakan yang berbeda dalam mengurangi kedalaman kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Gambar 8. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2011-2015



Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Apabila angka indeks kedalaman kemiskinan ini kita bandingkan dengan angka nasional, terlihat bahwa angka indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi jauh lebih rendah atau secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Provinsi Jambi kesenjangan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Provinsi Jambi Menurut Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Nasional	Jambi	Nasional	Jambi	Nasional	Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011	1,519	1,306	2,632	0,808	2,078	0,961
September 2011	1,483	1,741	2,600	1,093	2,044	1,292
Maret 2012	1,403	1,500	2,353	1,091	1,880	1,217
September 2012	1,388	2,365	2,408	0,931	1,901	1,371
Maret 2013	1,257	1,423	2,229	0,798	1,745	0,990
September 2013	1,410	1,217	2,357	1,075	1,883	1,118
Maret 2014	1,249	1,351	2,259	0,914	1,753	1,048
September 2014	1,255	1,185	2,249	1,097	1,751	1,124
Maret 2015	1,398	2,130	2,554	1,117	1,971	1,425
September 2015	1,293	1,614	2,400	1,599	1,841	1,604

Sumber: BPS RI, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Jika di tingkat nasional indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, lain halnya yang terjadi di Provinsi Jambi. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan Provinsi Jambi jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perkotaan Provinsi Jambi relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Sebaliknya rata-rata tingkat pengeluaran penduduk miskin perdesaan nasional dari lebih menjauhi garis kemiskinan dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengeluaran daerah perkotaan.

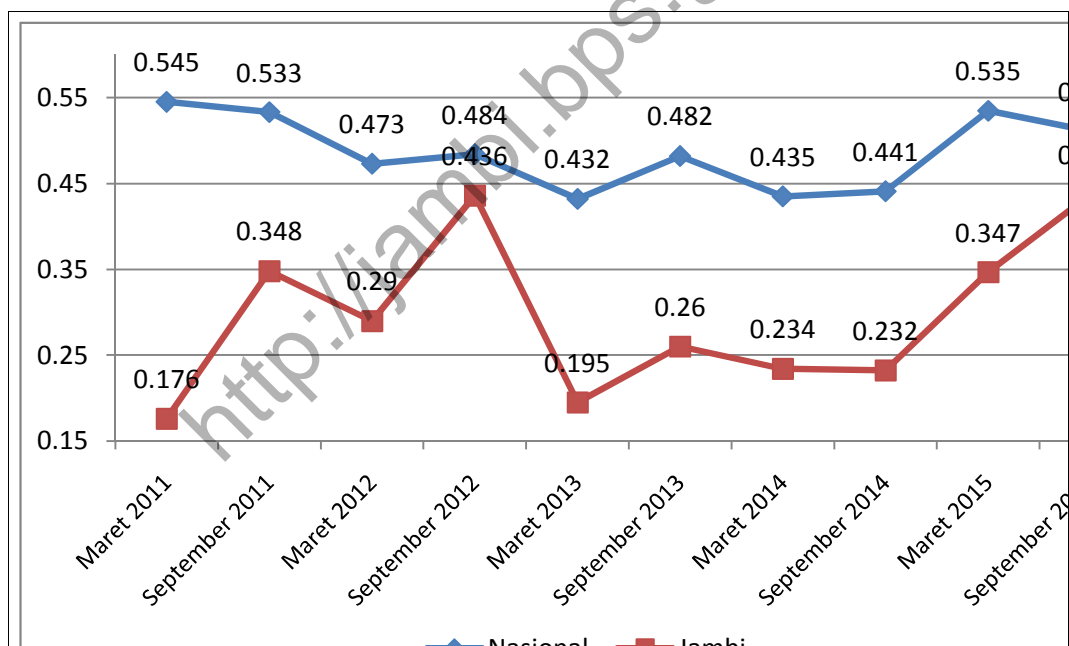
Selanjutnya akan diuraikan mengenai indeks keparahan kemiskinan (P_2). Pengertian dari indeks keparahan kemiskinan adalah angka yang menunjukkan variasi tingkat kesejahteraan di antara sesama penduduk miskin. Angka indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2011-2015 menunjukkan pola yang berfluktuasi antar periode waktu. Selama periode waktu 2011-2015 Indeks Keparahannya juga mengalami kenaikan dari 0,176 pada Maret 2011 menjadi 0,437 pada September 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pada pengeluaran penduduk miskin semakin lebar.

Gambar 9. Indeks Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di Provinsi Jambi Menurut Daerah, Tahun 2011-2015



Ada hal menarik dari data kedua indeks ini, dimana pada september 2013 indeks keparahan kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di Perdesaan. Artinya pada momentum tersebut mulai ada pergeseran tingkat keparahan kemiskinan, dimana biasanya kemiskinan di perkotaan lebih parah dibanding perdesaan, namun pada periode September 2015 menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Diprediksikan bahwa pada periode kedepan ada kemungkinan pola tersebut berulang, hal ini bisa dilihat dari pola indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pembuat program dan pengambil kebijakan perlu rumusan serius agar indeks keparahan kemiskinan tidak meningkat secara terus-menerus.

Gambar 10. Indeks Keparahhan Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2011-2015



Jika dibandingkan dengan angka nasional, tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi secara umum lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Jika pola angka indeks keparahan kemiskinan nasional di perkotaan lebih rendah dibandingkan angka perkotaan untuk Provinsi Jambi, namun sebaliknya indeks keparahan kemiskinan perdesaan nasional lebih tinggi

dibandingkan dengan angka indeks keparahan kemiskinan perdesaan untuk Provinsi Jambi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional.

Tabel 3. Indeks Keparahhan Kemiskinan (P₂) di Provinsi Jambi Menurut Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Nasional	Jambi	Nasional	Jambi	Nasional	Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011	0,392	0,264	0,697	0,137	0,545	0,176
September 2011	0,389	0,532	0,675	0,266	0,533	0,348
Maret 2012	0,357	0,357	0,589	0,260	0,473	0,290
September 2012	0,357	0,924	0,610	0,219	0,484	0,436
Maret 2013	0,309	0,329	0,554	0,135	0,432	0,195
September 2013	0,368	0,252	0,597	0,263	0,482	0,260
Maret 2014	0,306	0,323	0,566	0,194	0,435	0,234
September 2014	0,309	0,268	0,574	0,216	0,441	0,232
Maret 2015	0,364	0,535	0,708	0,265	0,535	0,347
September 2015	0,355	0,397	0,669	0,455	0,511	0,437

Jika di tingkat nasional indeks keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, lain halnya yang terjadi di Provinsi Jambi. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Provinsi Jambi jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin di daerah perkotaan Provinsi Jambi relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Sebaliknya ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin perkotaan nasional lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengeluaran daerah perdesaan.

KONDISI KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI JAMBI

Dalam menganalisa tingkat kemiskinan, selain tiga indikator yang sering digunakan yaitu persentase kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan, masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga menjadi ukuran dalam menganalisa kemiskinan. Permasalahan kemiskinan dan

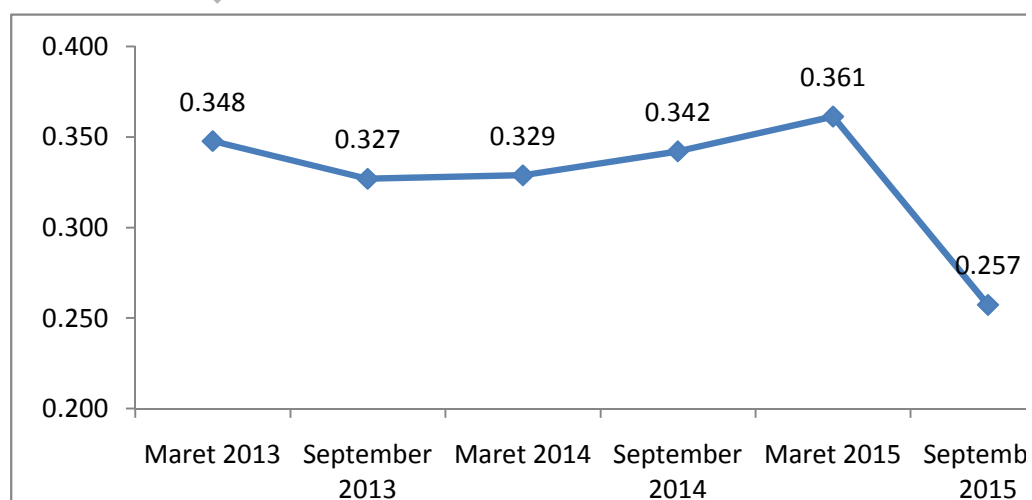
ketimpangan pendapatan merupakan dua masalah besar yang dihadapi dalam proses pembangunan bangsa ini. Oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan melalui program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (*proxy*) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat, mengingat data pendapatan sulit diperoleh. Demi kemudahan dalam analisis ini, indikator yang akan digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pengeluaran adalah koefisien Gini (Gini Ratio).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Secara umum angka gini rasio Provinsi Jambi termasuk kategori sedang dan mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2015. Hal ini ditunjukkan dari data koefisien gini sebesar 0,348 pada maret 2013 turun menjadi 0,257 pada september 2015. Menurunnya nilai koefisien gini mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Provinsi Jambi pada periode tersebut.

Gambar 11. Koefisien Gini Provinsi Jambi, 2013-2015

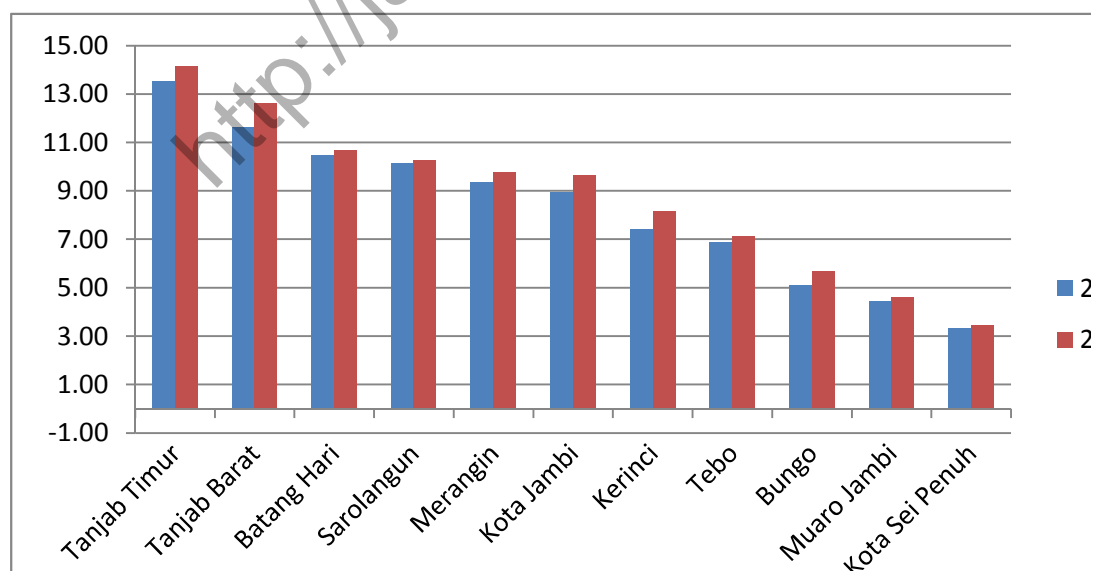


Ada hal yang harus diperhatikan dalam menginterpretasi koefisien gini yaitu ketimpangan ini menggambarkan distribusi pengeluaran rumah tangga dari semua tingkatan rumah tangga, jadi bisa saja ketimpangan turun disebabkan karena pengeluaran pada kelas atas menurun sehingga memperkecil jarak pengeluaran kelas bawah dan atas. Jadi bisa saja pengeluaran kelas bawah tidak berubah atau tidak mengalami perbaikan namun koefisien gini menurun. Hal ini agaknya cukup menjelaskan ketika persentase penduduk miskin meningkat pada september 2015 namun pada periode yang sama koefisien gini menunjukkan penurunan.

Kemiskinan Kabupaten/Kota

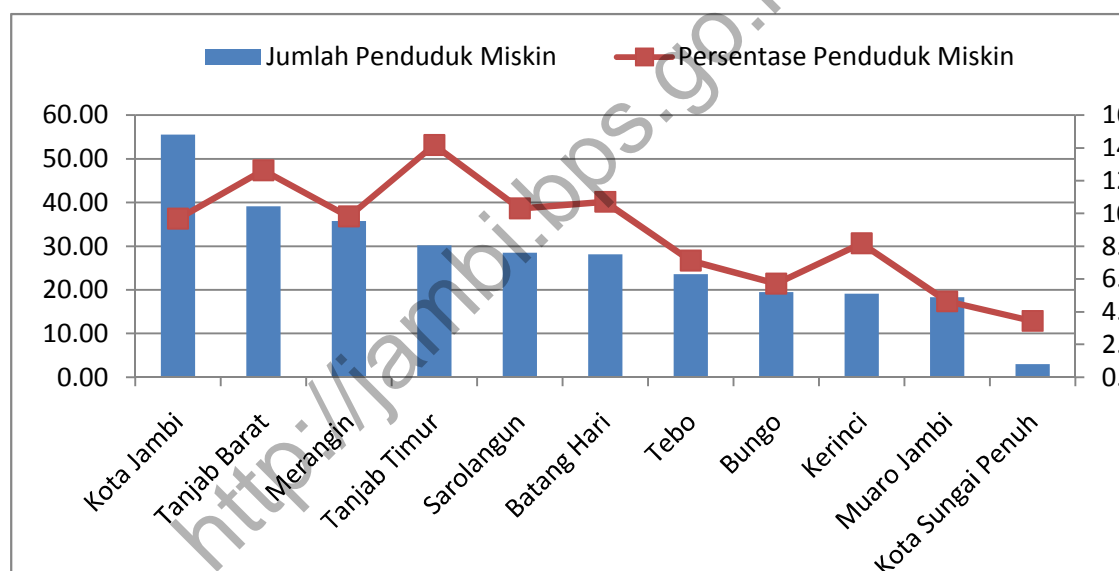
Persentase penduduk miskin kabupaten/kota pada tahun 2015 mengalami perubahan periode estimasi, dari yang sebelumnya menggunakan periode September, sekarang menjadi periode Maret. Hal ini semata-mata untuk mempercepat penyediaan data kemiskinan level kabupaten/kota yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan pengguna data lainnya.

Gambar 12. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, Tahun 2014-2015



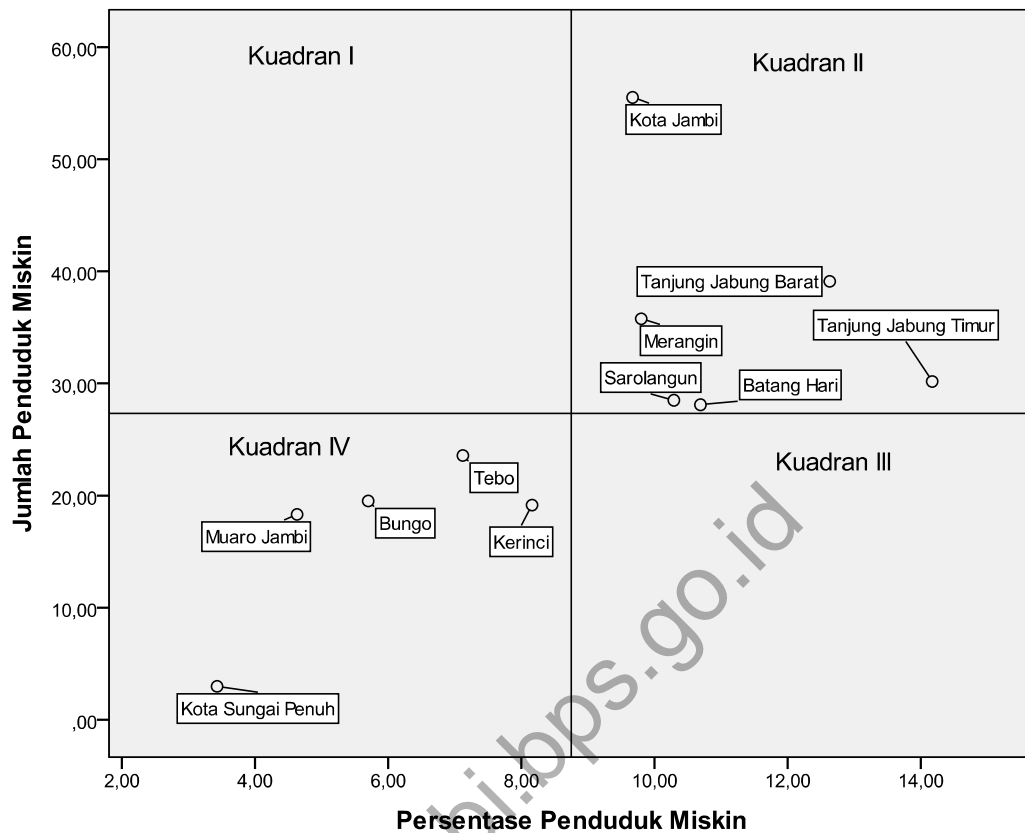
Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi, pada tahun 2015 semua kabupaten/kota mengalami kenaikan persentase penduduk miskin. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 0,99 persen, sementara kenaikan terendah terjadi di Kota Sungai Penuh yang hanya sebesar 0,10 persen. Persentase kemiskinan tertinggi masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 14,17 persen, serta terendah di Kota Sungai Penuh yang hanya sebesar 3,43 persen. Komposisi ini akan berbeda jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskinnya. Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 13. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, Tahun 2015



Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Jambi adalah yang tertinggi di Provinsi Jambi, mengingat secara jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi. Jika data persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun secara absolut jumlah penduduk miskin menempati peringkat keempat setelah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Merangin. Untuk melihat prioritas kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

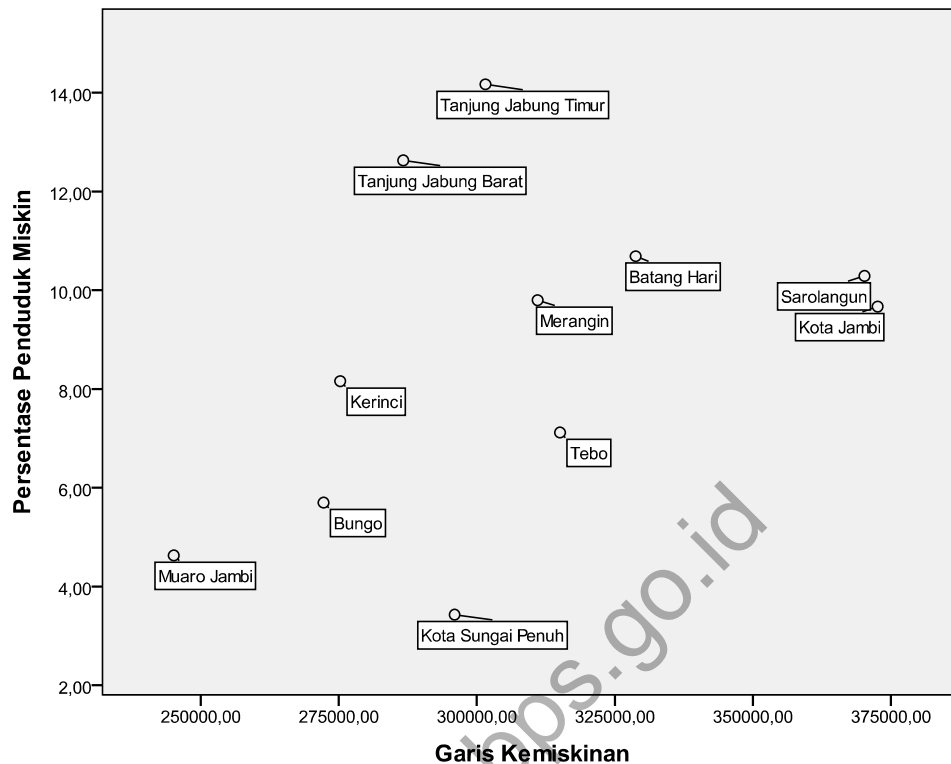
Gambar 14. Diagram Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2015



Pada Kuadran I prioritas program pengentasan kemiskinan semestinya diarahkan ke Kota Jambi beserta lima kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Batang Hari. Setiap kabupaten/kota memerlukan program yang berbeda sesuai dengan karakteristik penduduk miskinnya. Sebagai contoh untuk Kota Jambi prioritas program yang dibutuhkan lebih kepada peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk miskin. Berbeda halnya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur pelayanan dasar bagi penduduk miskin seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur jalan dalam rangka distribusi hasil-hasil pertanian.

Perubahan persentase penduduk miskin akan berkaitan erat dengan perubahan garis kemiskinan (GK) di setiap kabupaten/kota. Hubungan antara kedua hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 15. Pola Hubungan Garis Kemiskinan Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2015

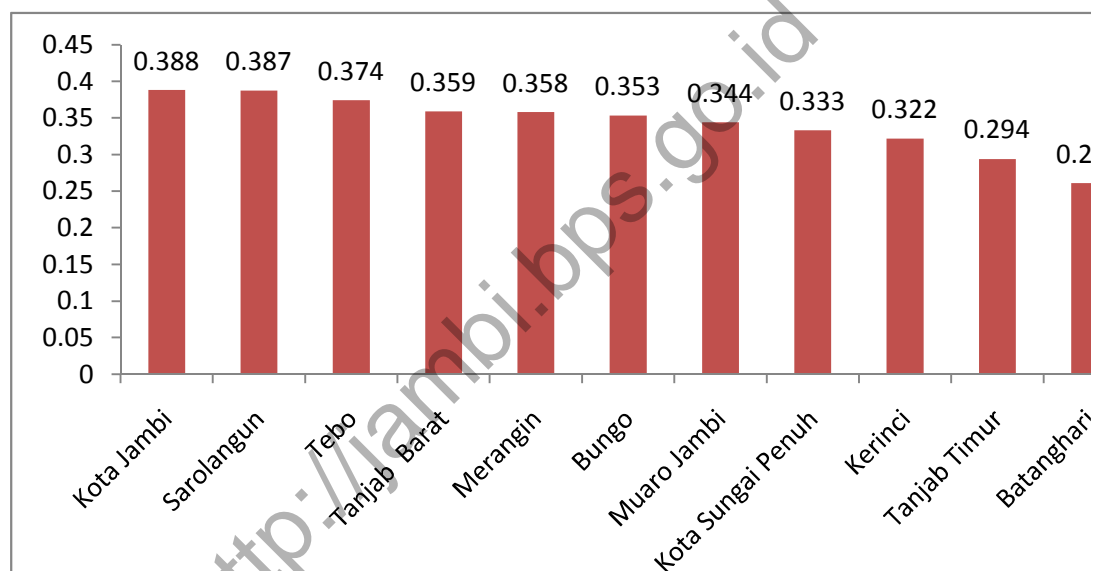


Dari gambar di atas terlihat ada dua pola, yaitu pola untuk dua Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, serta pola selain dua kabupaten tersebut. Apabila dilakukan perhitungan korelasi dengan memasukkan semua kabupaten/kota, maka diperoleh hubungan antara persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan sebesar 0,40. Namun ketika dua kabupaten (Tanjab Timur dan Tanjab Barat) dikeluarkan, maka hubungan antara GK dengan tingkat persentase kemiskinan menjadi semakin besar mencapai 0,71. Gambar di atas memperlihatkan bahwa kab Tanjab Timur dan Tanjab Barat memiliki pola atau tren kemiskinan yang berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya. Dengan melakukan analisis regresi untuk sembilan kabupaten/kota selain dua kabupaten tersebut diperoleh hasil bahwa semakin tinggi garis kemiskinan maka akan semakin besar persentase penduduk miskinnya.

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota

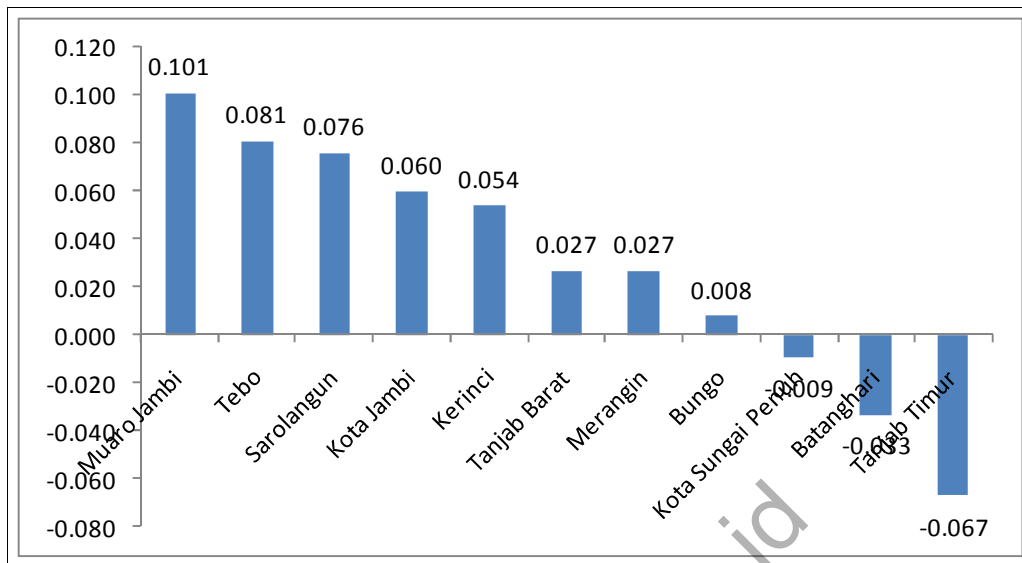
Jika diamati menurut besarnya koefisien gini tahun 2015, diketahui bahwa koefisien Gini Kota Jambi yang terbesar sementara yang terkecil adalah Kabupaten Batang Hari. Hal ini bisa dipahami karena pada umumnya di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi cenderung lebih tidak merata pendapatannya dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Struktur perekonomian yang bertumpu pada industri dan jasa bisa menjadi penyebab tingginya ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan.

Gambar 16. Koefisien Gini Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, 2015



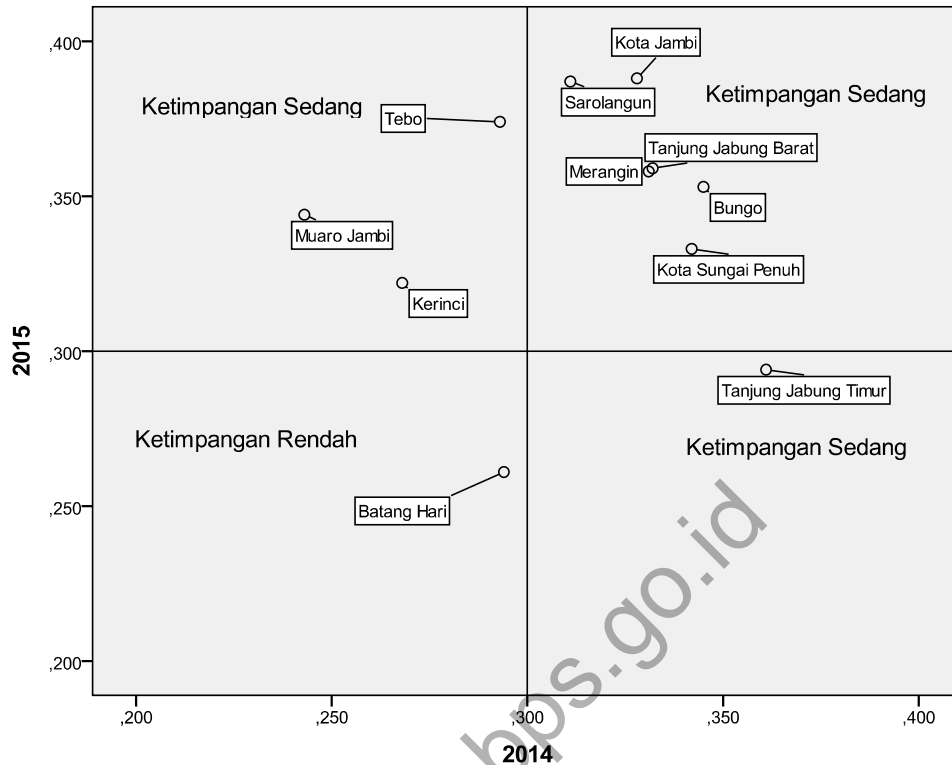
Pada tahun 2015, hampir semua kabupaten/kota mengalami kenaikan koefisien gini dibandingkan tahun 2014. Hanya ada tiga kabupaten/kota yang mengalami penurunan koefisien gini, yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kenaikan koefisien gini terbesar terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi industri kayu di Kabupaten Muaro Jambi yang menurun bisa jadi menjadi salah satu faktor naiknya koefisien gini di kabupaten ini, termasuk adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri kayu lapis yang jelas bisa mengurangi pendapatan rumah tangga bahkan kehilangan pendapatan utama rumah tangganya.

Gambar 17. Perubahan Koefisien Gini Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, Tahun 2014- 2015



Apabila dilihat menurut kategori ketimpangannya, pada tahun 2015 ini hampir semua kabupaten/kota termasuk kategori ketimpangan sedang, hanya Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk kategori ketimpangan rendah. Hal yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah ketika kemiskinan tinggi dan ketimpangan juga terjadi, kondisi ini akan menyebabkan masalah sosial yang sangat berat. Harus ada upaya untuk mengatasi hal ini, setidaknya ketika kemiskinan meningkat maka ketimpangan menurun, jangan sampai kedua hal ini mengalami kenaikan secara bersamaan.

Gambar 18. Diagram Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2015



Kategori kondisi ketimpangan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 ada beberapa perubahan. Ada tiga kabupaten yang pada tahun 2014 termasuk kategori ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berubah menjadi kategori ketimpangan rendah setelah sebelumnya masuk kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya tidak mengalami perubahan kategori ketimpangan pendapatan.

LAMPIRAN
Tabel 1. Komponen Pengeluaran Konsumsi Penduduk

Jenis Pengeluaran		Komoditi
(1)		(2)
A.	PANGAN	
	1. Padi-padian dan hasil-hasilnya	Beras, Beras Ketan, Jagung Pipilan, Tepung Terigu
	2. Umbi-umbian dan hasil-hasilnya	Ketela pohon, ketela rambat, gaplek beras
	3. Ikan dan hasil-hasil ikan lainnya	tongkol/tuna/cakalang, kembung, teri, bandeng, mujair
	4. Daging	sapi, babi, ayam ras, ayam kampung, tetelan
	5. Telur, susu, dan hasil-hasil susu	telur ayam ras, telur iti/manila, susu kental manis, susu bubuk
	6. Sayur-sayuran	bayam, buncis, kacang panjang, tomat sayur, daun ketela pohon, nangka muda, bawang merah, cabe merah, cabe rawit
	7. Kacang-kacangan	kacang tanah tanpa kulit, tahu, tempe
	8. Buah-buahan	mangga, salak, pisang ambon, pepaya
	9. minyak dan lemak	Minyak kelapa, kelapa
	10. bahan minuman	gula pasir, gula merah, the, kopi
	11. bumbu-bumbuan	garam, kemiri, terasi/petis
	12. Konsumsi Lainnya	kerupuk, mie instan
	13. Makanan dan minuman jadi	roti manis, kue kering, kue basah
	14. tembakau dan sirih	rokok kretek filter
B.	BUKAN PANGAN	
	1. Perumahan	Rumah sendiri/bebas sewa, Listrik PLN, Minyak tanah, Kayu bakar, Air dibeli, Baterai, Korek api/lilin, Obat nyamuk, Bola lampu, lainnya (semprong sumbu (hanya di perdesaan))
	2. Barang-barang dan jasa-jasa	Sabun mandi, Pasta gigi, Shampo, Sikat gigi, Minyak wangi, Minyak rambut, Bedak, Lipstik, Pangkas rambut, Puskesmas, Dokter praktek (hanya di perkotaan), Berobat sendiri, Uang sekolah, Buku pelajaran SD/SLTP, alat tulis SD/SLTP, Pos dan benda pos, Bis dan kereta api, Becak-andong, ojek, penyebrangan sungai, Foto (hanya di perkotaan)
	3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.	Pakaian Jadi, Alas Kaki untuk anak-anak, Sabun cuci batangan, Sabun bubuk dan krim, Handuk, Mukena-sajadah, Semir sepatu-sikat sepatu (hanya di perkotaan)
	4. Barang-barang yang tahan lama	Sapu, Gunting-pisau-gergaji-dsb, Periuk-panci-ember-penggorengan, Sendok-garpu-gelas-piring, Tas (termasuk tas sekolah)
	5. Pajak dan Asuransi	Pajak bumi dan bangunan, Pajak televisi (hanya di perkotaan), pungutan lainnya (hanya di perkotaan)
	6. Keperluan pesta dan upacara	Idul fitri, Idul adha, Natal, Waisak, Galungan

Tabel 2. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2012-2015

Kab/Kota	Garis Kemiskinan (Rp)			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	252.734	262.679	268.285	275.265
Merangin	263.934	284.393	296.348	310.997
Sarolangun	330.543	354.679	363.909	370.205
Batanghari	285.713	306.054	317.870	328.769
Muaro Jambi	225.169	233.773	238.617	245.123
Tanjung Jabung Timur	266.685	283.415	293.057	301.563
Tanjung Jabung Barat	254.547	270.069	279.000	286.671
Tebo	273.695	294.410	306.494	315.053
Bungo	244.463	257.567	265.054	272.254
Kota Jambi	322.736	346.099	359.686	372.600
Kota Sungai Penuh	253.297	274.586	287.101	295.969
Provinsi Jambi	273.267	307.885	329.181	343.935

Tabel 3. Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2015

Kab/Kota	2014		2015	
	Jumlah (000)	Persentase	Jumlah (000)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	17,40	7,43	19,15	8,16
Merangin	33,90	9,37	35,77	9,80
Sarolangun	27,83	10,17	28,50	10,29
Batanghari	27,09	10,50	28,10	10,69
Muaro Jambi	17,42	4,45	18,32	4,63
Tanjung Jabung Timur	28,79	13,55	30,18	14,17
Tanjung Jabung Barat	35,68	11,64	39,10	12,63
Tebo	22,48	6,89	23,57	7,12
Bungo	17,34	5,12	19,52	5,70
Kota Jambi	50,95	8,94	55,51	9,67
Kota Sungai Penuh	2,88	3,33	2,98	3,43
Provinsi Jambi	263.562	9,12	263.800	7,92

Tabel 4 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Jambi, Tahun 2014-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2014		2015	
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)
1.	Kerinci	1,10	0,26	1,30	0,36
2.	Merangin	1,39	0,33	1,57	0,32
3.	Sarolangun	1,08	0,17	1,08	0,18
4.	Batanghari	0,95	0,14	1,96	0,54
5.	Muaro Jambi	0,44	0,07	0,61	0,13
6.	Tanjab Timur	1,92	0,44	1,98	0,45
7.	Tanjab Barat	1,82	0,45	2,15	0,61
8.	Tebo	0,69	0,12	0,70	0,11
9.	Bungo	0,58	0,10	0,64	0,12
10.	Kota Jambi	0,98	0,20	1,36	0,25
11.	Kota Sungai Penuh	0,39	0,07	0,53	0,12
Provinsi Jambi		1,37	0,44	1,12	0,26

Tabel 5. Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015

No.	Kabupaten /Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kerinci	0,308	0,320	0,298	0,268	0,322
2.	Merangin	0,323	0,311	0,329	0,331	0,358
3.	Sarolangun	0,408	0,364	0,383	0,311	0,387
4.	Batanghari	0,320	0,297	0,292	0,294	0,261
5.	Muaro Jambi	0,256	0,299	0,281	0,243	0,344
6.	Tanjung Jabung Timur	0,295	0,280	0,285	0,361	0,294
7.	Tanjung Jabung Barat	0,337	0,320	0,308	0,332	0,359
8.	Tebo	0,288	0,303	0,299	0,293	0,374
9.	Bungo	0,342	0,365	0,330	0,345	0,353
10.	Kota Jambi	0,359	0,362	0,335	0,328	0,388
11.	Kota Sungai Penuh	0,296	0,321	0,322	0,342	0,333

<http://jambi.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://jambi.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

Jln. A. Yani No. 4 Telanaipura-Jambi (36122)

Email: bps1500@bps.go.id

Homepage: <http://jambi.bps.go.id>